

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, Retno Sunu. Hardi Warsono. Abd Rachim. 2020. *Collaborative governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Alfiandri, dkk. 2019. *Collaborative governance: Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan Dalam Dunia Investasi*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Eko Priyo Purnomo, dkk. 2018. *Collaborative governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah.
- Firdausijah, Taqwaty R (dkk). 2023. *Manajemen Sektor Publik*. Sumatera Barat. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hajar Malawat, Sitna. 2022. *Buku Pengantar Admistrasi Publik*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/bukupengantaradminitrasipublik.pdf>.
- La Ode Syaiful Islamy. 2018. *Collaborative governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish.
- Noor, Muhammad. Falih Sunaedi. Antun Mardianta. 2022. *Collaborative governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Bildung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyunengseh. Rutiana Dwi, dkk. 2012. *Public Governance: Pemerintah dan Masyarakat Saling Memperkuat Dalam kepedulian dan Sinergitas*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (Press UNS).
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). *Collaboration Processes: Inside the Black Box*. Public Administration Review, 66(SUPPL. 1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>

Jurnal

- Aiyub, et al. (2021). *Tata Kelola Kolaboratif dalam Pencegahan Narkoba di Lhokseumawe , Indonesia*. 495(ICoSPOLHUM 2020), 332–339.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). *Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia*. *Jiap*, 7(2), 158–163.
- Dewi, N. L. Y. (2019). *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Haryono, N. (2019). *Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. 47–53.
- Masalah, A. L. B. (2000). *BAB I PENDAHULUAN*. 15–28.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D.,

- د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Nisi, M. (2022). *Colaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah*.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *E-Journal of Public Policy and Management Review*, 3, 1–17.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Internet

- Website <https://aceh.antaranews.com/berita/186072/angka-kriminalitas-di-wilkum-polres-meningkat-422-persen>
- Website <https://aceh.inews.id/berita/angka-kriminalitas-di-lhokseumawe-naik-di-2022-didominasi-pencurian-dengan-kekerasan>
- Website <https://ms.zhujiworld.com>
- Website <https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/1043>
- Website <https://jdih.lhokseumawekota.go.id/news/page/gambaran-umum>